



## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan**

Penyajian Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Murung Raya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan ini dibuat dan dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalah pahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan SOPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam

- a. Landasan Idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-undang nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang- undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622)
- e. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang- undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- h. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- i. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- j. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- k. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



- l. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - m. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - n. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - o. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - r. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  - t. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
  - u. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
  - v. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4027);
  - w. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4027);
  - x. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
  - y. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - x. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584);
  - z. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - aa. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
  - cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017);
- Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok



Pengelolaan Keuangan Daerah;

- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 6 Tahun 2019);
- ee. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 16).

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### *Bab. I Pendahuluan*

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### *Bab. II Kebijakan Akuntansi*

- 2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 2.1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 2.1.2. Neraca
  - 2.1.3. Aset
  - 2.1.4. Kewajiban
  - 2.1.5. Ekuitas
  - 2.1.6. Laporan Operasional (LO)
  - 2.1.7. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - 2.1.8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- 2.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 2.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

#### *Bab. III Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan*

- 3.1. Penjelasan Umum
  - A. Dasar Hukum
  - B. Data Dasara Penyusunan Neraca Daerah
  - C. Standar Akuntansi Pemerintahan
- 3.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA)
  - 3.2.1 Belanja
    - 3.2.1.1 Belanja Operasi
    - 3.2.1.2 Belanja Modal
- 3.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
  - 3.3.1 Aset
    - 3.3.1.1 Aset Lancar
    - 3.3.1.2 Kas di Kas Bendaharawan Pengeluaran
    - 3.3.1.3 Persediaan
  - 3.3.2 Aset Tetap
    - 3.3.1.2.1 Tanah
    - 3.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin
    - 3.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan
    - 3.3.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
    - 3.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya
    - 3.3.1.2.6 Akumulasi Penyusutan
    - 3.3.1.2.7 Aset Lainnya
  - 3.3.3 Kewajiban
    - 3.3.3.1 Kewajiban Jangka Pendek
  - 3.3.4 Ekuitas
- 3.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional



- 3.4.1 Beban Pegawai - LO
- 3.4.2 Beban Barang dan Jasa - LO
- 3.4.3 Beban Hibah - LO
- 3.4.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO
- 3.4.5 Beban Lain- Lain - LO
- 3.4.6 Surplus Defisit - LO
- 3.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

*Bab. IV PENUTUP*

## **BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip- prinsip, dasar - dasar, konvensi - konvensi, aturan - aturan, dan praktik -praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SOPD sebagai Entitas akuntansi adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

### **2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SOPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya yaitu Basis Akrua, untuk pengakuan pendapatan -LO, Beban Aset, Kewajiban Ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikan laporan keuangan basis akrua, maka entitas pelaporan wajib menyajikan demikian

Basis akrua untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh



pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan pendapatan seperti bantuan pihak luar/ asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis Kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan, serta belanja transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggarang terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing- masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan - LRA adalah Penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun -tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya terutama dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

### **2.1.2 NERACA**

Unsur yang dicakup secara langsung oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Masing- masing didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masalalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.

### **2.1.3 ASET**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.

Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki



aset lancar sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat dicairkan atau untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya atau digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi : Investasi non permanen, dan investasi permanen. Investasi Non Permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, Penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya dan Investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

#### **2.1.4 KEWAJIBAN**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang- undangan

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **2.1.5 EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan Kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **2.1.6 LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu periode pelaporan

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan - LO, beban, transfer, dan pos- pos luar biasa. Masing- masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan - LO adalah hak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran yang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena





kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

### **2.1.7 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **2.1.8 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal- hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi- transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing- masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## **2.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar nilai pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos- pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

## **2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka penyusunan Neraca Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.



### **BAB III**

#### **PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN KEUANGAN**

##### **3.1 Penjelasan Umum**

Laporan Keuangan yang telah disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing- masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

##### **A. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Neraca adalah :

1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

##### **B. Data Dasar Penyusunan Neraca Daerah**

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2019 adalah :

1. Neraca awal dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2018 yang telah diaudit BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah;
2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019;





3. Rekening Koran pada PT. Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2019;
4. Neraca SOPD dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2019;
5. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca Per 31 Desember 2019.

**B. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya pada Tahun 2019 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan Daerah menggunakan dasar basic accrual dalam menyajikan laporan keuangannya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

**BAB IV**

**P E N T U P**

Sebagai Penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 dapat disampaikan hal- hal berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
2. Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (PABU) dengan basis/ dasar kas modifikasi. Kas Modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas;
3. Diharapkan dengan terbitnya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.

Demikian Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, 10 Pebruari 2020

**KEPALA DINAS,**

**Drs. SARWO MINTARJO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19700708 199003 1 005**



3. 2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

3. 2. 1. Belanja

Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada periode Tahun Anggaran 2019 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya, meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2019 serta Realisasi TA.2019 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Operasi	13.649.232.917,00	13.293.786.371,00	97,40	19.219.454.390,00
2	Belanja Modal	1.118.050.000,00	1.094.104.800,00	97,86	987.994.303,00
	Jumlah	14.767.282.917,00	14.387.891.171,00	97,43	20.207.448.693,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2019 sebesar Rp 14.767.282.917,00 terealisasi sebesar Rp.14.387.891.171,00,- atau 97,43 %. Dibandingkan realisasi TA.2018 Rp.20.207.448.693,00,- yang berarti Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 5.819.557.552,00,-

3. 2. 1. 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah dengan target anggaran dan realisasi TA.2019 dan TA.2018, sebesar Rp. 13.649.232.917,00 terealisasi sebesar Rp. 13.293.786.371,00 atau 97,40 % dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 19.219.454.360,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.819.557.552,00

Rincian realisasi Belanja Operasi TA.2019 sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Pegawai	5.564.923.017,00	5.293.261.304,00	95,12	6.114.826.275,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.471.609.900,00	4.410.469.067,00	98,63	4.934.184.115,00
3	Belanja Hibah	3.612.700.000,00	-	-	8.170.444.000,00
	Jumlah	13.649.232.917,00	9.703.730.371,00	71,09	19.219.454.390,00

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2019 serta realisasi TA.2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.607.788.420,00	1.466.368.900,00	91,20	1.405.371.780,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	146.969.290,00	131.521.652,00	89,49	123.212.118,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	212.427.100,00	191.370.000,00	90,09	192.990.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras	88.750.710,00	77.996.340,00	87,88	77.489.400,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.106.570,00	3.309.444,00	80,59	2.930.753,00
6	Belanja Pembulatan Gaji	29.330,00	22.118,00	75,41	20.377,00
7	Tunjangan Umum	37.754.950,00	34.740.000,00	92,01	35.625.000,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan (JKK)	3.741.040,00	2.990.356,00	79,93	2.877.149,00
9	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.223.090,00	8.970.994,00	79,93	3.616.698,00
10	Tunjangan Lauk Pauk	218.132.517,00	218.118.000,00	99,99	214.437.000,00
11	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.257.850.000,00	1.197.450.000,00	95,20	1.524.500.000,00
12	Belanja Uang Lembur PNS	50.000.000,00	49.894.000,00	99,79	49.486.000,00
13	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	386.960.000,00	371.319.500,00	95,96	926.350.000,00
14	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	0,00	-
15	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	-	-	0,00	-
16	Honorarium PNS Lainnya	-	-	0,00	-
17	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	-	-	0,00	-
18	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	1.539.190.000,00	1.539.190.000,00	100,00	1.555.920.000,00
	Jumlah	5.564.923.017,00	5.293.261.304,00	95,12	6.114.826.275,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA.2019 sebesar Rp.5.564.923.017,00 terealisasi sebesar Rp. 5.293.261.304,00 atau 95,12 %, jika dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 6.114.826.275,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 821.564.971,00 atau 15,52 %

2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA.2019 serta realisasi TA.2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	306.594.000,00	306.190.300,00	99,87	351.643.700,00



	Belanja Alat Tulis Kantor	170.150.000,00	169.838.800,00	99,82	197.713.750,00
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	6.975.500,00	99,65	9.800.000,00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	19.444.000,00	19.441.000,00	99,98	29.196.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	14.991.000,00	99,94	14.997.950,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	95.000.000,00	94.944.000,00	99,94	99.936.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.366.000,00</b>	<b>99,75</b>	<b>107.030.000,00</b>
	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	49.866.000,00	99,73	89.530.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	#DIV/0!	4.000.000,00
	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.500.000,00
	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pendukung Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bahan Percontohan Pameran	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
	Belanja Umbul-umbul	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Belanja Tanah Subur	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>3</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>203.860.000,00</b>	<b>192.093.617,00</b>	<b>94,23</b>	<b>162.995.527,00</b>
	Belanja Telepon	3.600.000,00	2.301.300,00	63,93	3.001.880,00
	Belanja Air	1.200.000,00	1.162.000,00	96,83	1.178.000,00
	Belanja Listrik	86.400.000,00	85.112.684,00	98,51	68.620.187,00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	29.995.000,00	99,98	26.550.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	14.960.000,00	13.722.633,00	91,73	12.845.460,00
	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	67.700.000,00	59.800.000,00	88,33	40.800.000,00
<b>4</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>102.500.000,00</b>	<b>100.791.000,00</b>	<b>98,33</b>	<b>82.670.966,00</b>
	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	24.949.966,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	80.000.000,00	79.957.000,00	99,95	43.998.500,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	8.000.000,00	7.971.000,00	99,64	9.615.000,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	8.363.000,00	83,63	4.107.500,00
<b>5</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>166.300.000,00</b>	<b>162.167.550,00</b>	<b>97,52</b>	<b>185.175.600,00</b>
	Belanja Cetak	46.050.000,00	42.036.700,00	91,28	57.596.400,00
	Belanja Penggandaan	120.250.000,00	120.130.850,00	99,90	127.579.200,00
<b>6</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>23.550.000,00</b>	<b>22.450.000,00</b>	<b>95,33</b>	<b>23.050.000,00</b>
	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	22.750.000,00	22.450.000,00	98,68	19.850.000,00
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
<b>7</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>7.000.000,00</b>
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	#DIV/0!	7.000.000,00
<b>8</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Belanja Sewa Generator	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	17.500.000,00
<b>9</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>235.088.000,00</b>	<b>213.190.000,00</b>	<b>90,69</b>	<b>381.682.000,00</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.008.000,00	15.988.000,00	99,88	65.100.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	22.500.000,00	20.272.000,00	90,10	10.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	196.580.000,00	176.930.000,00	90,00	306.582.000,00
<b>10</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>89.418.300,00</b>
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	#DIV/0!	89.418.300,00
	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>97.500.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>99,69</b>	<b>4.998.000,00</b>
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	97.500.000,00	97.200.000,00	99,69	4.998.000,00

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
<b>12</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu</b>	<b>69.400.000,00</b>	<b>69.360.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>80.370.000,00</b>
	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pakaian adat daerah	0,00	0,00	#DIV/0!	13.000.000,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	67.370.000,00
	Belanja Pakaian Olahraga	52.400.000,00	52.360.000,00	99,92	0,00
<b>13</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.009.517.900,00</b>	<b>2.996.821.600,00</b>	<b>99,58</b>	<b>3.211.528.306,00</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.845.277.900,00	1.843.400.400,00	99,90	2.016.548.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.164.240.000,00	1.153.421.200,00	99,07	1.194.980.306,00



14	Belanja Pemeliharaan	35.500.000,00	35.476.000,00	99,93	74.147.500,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	20.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.976.000,00	99,88	54.147.500,00
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	#DIV/0!	14.500.000,00
	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	#DIV/0!	14.500.000,00
16	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	#DIV/0!	23.400.000,00
	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	0,00	#DIV/0!	23.400.000,00
	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Honorarium PNS	24.900.000,00	22.900.000,00	91,97	9.000.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.900.000,00	22.900.000,00	91,97	9.000.000,00
	Honorarium PNS Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Honorarium Non PNS	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	4.800.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.900.000,00	72.900.000,00	100,00	4.800.000,00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Selain Hibah/Bansos	-	-	0,00	26.572.000,00
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga Selain Hibah Bansos	-	-	0,00	26.572.000,00
21	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Sound System	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Sound System	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	69.000.000,00	64.063.000,00	92,84	64.202.216,00
	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	69.000.000,00	64.063.000,00	92,84	64.202.216,00
24	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Uang	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Barang	0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	4.471.609.900,00	4.410.469.067,00	98,63	4.934.184.115,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.471.609.900,00 realisasi sebesar Rp. 4.410.469.067,00 atau 98,63 %. Realisasi TA.2019 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 4.934.184.115,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 523.715.048,00 atau sebesar 11,87%

3. Belanja Hibah

Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Belanja Hibah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	3.612.700.000,00	3.590.056.000,00	99,37	8.170.444.000,00
	Jumlah	3.612.700.000,00	3.590.056.000,00	99,37	8.170.444.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja Hibah TA.2019 sebesar Rp. 3.612.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.590.056.000,00 atau 99,37%, Dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 8.170.444.000,00 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 4.580.388.000,00 atau (127,59%)

3 2. 1. 2. Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap DPMD. Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dengan anggaran dan realisasi dalam TA.2019 dan realisasi TA.2018 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :



No	Belanja Modal	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	396.550.000,00	393.832.300,00	99,31	297.739.303,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	721.500.000,00	700.272.500,00	97,06	660.755.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!	29.500.000,00
	Jumlah	1.118.050.000,00	1.094.104.800,00	97,86	987.994.303,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA.2019 sebesar Rp. 1.118.050.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.094.104.800,00 atau 97,86%, Dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 987.994.303,00, maka belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp. 106.110.497,00 atau 9,70%

Rincian Realisasi Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Belanja Modal	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>128.000.000,00</b>	<b>126.832.000,00</b>	<b>99,09</b>	<b>109.797.000,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	128.000.000,00	126.832.000,00	99,09	109.797.000,00
2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>59.900.000,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	60.000.000,00	59.900.000,00	99,83	0,00
3	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	15.000.000,00
4	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
5	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>122.050.000,00</b>	<b>121.565.500,00</b>	<b>99,60</b>	<b>34.470.000,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	82.600.000,00	82.115.500,00	99,41	10.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	31.100.000,00	31.100.000,00	100,00	24.470.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00	0,00
6	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer</b>	<b>69.500.000,00</b>	<b>68.534.800,00</b>	<b>98,61</b>	<b>98.152.303,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	54.500.000,00	53.911.800,00	98,92	66.220.560,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	14.623.000,00	97,49	31.931.743,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
7	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.320.000,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	0,00	40.320.000,00
9	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	0	0	-	0
	JUMLAH	396.550.000,00	393.832.300,00	99,31	297.739.303,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA.2019 sebesar Rp.396.550.000,00 terealisasi sebesar Rp.393.832.300,00 atau 99,31%. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 297.739.303,00 maka mengalami kenaikan sebesar 24,40 %

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan



Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2019 sebagai berikut :

NO.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>721.500.000,00</b>	<b>700.272.500,00</b>	<b>97,06</b>	<b>660.755.000,00</b>
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	721.500.000,00	700.272.500,00	97,06	660.755.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0	0	-	-
		721.500.000,00	700.272.500,00	97,06	660.755.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA.2019 sebesar Rp. 721.500.000,00, terealisasi sebesar Rp. 700.272.500,00 atau 97,06% . Dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 660.755.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 485.205.000,00 atau 5,64 %

3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2019 adalah Rp.0,00:

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2019 adalah Sebagai Berikut :

No.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>29.500.000,00</b>
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	#DIV/0!	29.500.000,00
	<b>JUMLAH</b>				

Untuk Realisasi totalan Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2019 adalah Rp. 1.094.104.800,00 dan Realisasi TA.2018 Rp. 987.994.303,00.

5. Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari target anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A.2019 yaitu sebesar Rp. 14.767.282.917,00 dan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2019 Rp.14.387.891.171,00, maka nilai defisit sebesar (Rp. 14.387.891.171,00)

No	Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp
1	Realisasi Pendapatan - LRA	-	-	-	-
2	Realisasi Belanja	14.767.282.917,00	14.387.891.171,00	97,43	20.207.448.693,00
3	Realisasi Transfer	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(14.767.282.917,00)</b>	<b>(14.387.891.171,00)</b>	<b>97,43</b>	<b>(20.207.448.693,00)</b>





3.3 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA

Neraca Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 9.151.022.573,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 458.691.079,00 atau bertambah 2,73 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 8.900.836.230,00.

Kenaikan nilai aset tersebut sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan akuntansi berbasis akrual dimana untuk penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Penyisihan Piutang diperhitungkan.

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Aset  
3.3.1.1 Aset Lancar

3.3.1.1.1 Kas di Kas Bendaharan Pengeluaran

Dikas Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

3.3.1.1.2 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.899.143,00 sedangkan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.580.515,00.

No.	SKPD	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.899.143,00	2.580.515,00	1.899.143,00	2.580.515,00
	Jumlah	1.899.143,00	2.580.515,00	1.899.143,00	2.580.515,00

3.3.1.1.3 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja.

Saldo persediaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.448.500,00 dari Tahun 2018 sebesar Rp.1.249.200,00

No	Persediaan	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1.249.200,00	169.838.800,00	169.639.500,00	1.448.500,00
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar Batere Kering)	-	6.975.500,00	6.975.500,00	-
3	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	-	19.441.000,00	19.441.000,00	-
4	Persediaan Bahan Kebersihan dan Pembersih	-	14.991.000,00	14.991.000,00	-
5	Persediaan Bahan Baku Bangunan	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6	Barang Yang Diserahkan Kepada Fihak Ketiga/ Masyarakat Berupa Fisik Bangunan	-	2.719.666.000,00	2.719.666.000,00	-
7	Barang Yang Diserahkan Kepada Fihak Ketiga/ Masyarakat Berupa Barang	-	870.390.000,00	870.390.000,00	-
	Jumlah	1.249.200,00	3.803.302.300,00	3.803.103.000,00	1.448.500,00

Rincian persediaan Alat Tulis kantor (ATK) T.A 2019 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

No	Persediaan	Sisa Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Kertas F-4	10	Rim	60.000,00	600.000,00
2	Kertas A-4	4	Rim	58.000,00	232.000,00
3	Kertas NCR 6 Rangkap	4	Blok	68.500,00	274.000,00
4	Anak Stapler No. 10	5	Kotak	7.500,00	37.500,00
5	Paper Clips	5	Kotak	5.000,00	25.000,00
6	Stopmap Batik	12	Kotak	3.750,00	45.000,00
7	Balpoint Pilot G-2-07 Warna Biru	1	Kotak	235.000,00	235.000,00
	Jumlah	41			1.448.500,00

3.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2019 dan 2018. Perolehan aset tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 9.061.543.558,00 mengalami Peningkatan nilai sebesar Rp. 300.855.671,00 dari tahun 2018 sebesar Rp. 8.760.687.887,00 atau 3,32% dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

--	--	--	--	--	--



No	Aset Tetap	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Tanah	738.984.000,00	-	-	738.984.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.375.432.884,00	393.832.300,00	338.929.300,00	6.430.335.884,00
3	Gedung dan Bangunan	6.944.785.404,00	700.272.500,00	-	7.645.057.904,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	175.470.000,00	-	-	175.470.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
7	Aset Lainnya	-	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan	(5.473.984.401,00)	-	-	(5.928.304.230,00)
	Jumlah	8.760.687.887,00	1.094.104.800,00	338.929.300,00	9.061.543.558,00

3.3.1.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.738.984.000,00 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp.738.984.000,00. Rincian Saldo Aset Tetap Berupa tanah dapat disajikan sebagai berikut :

No	Tanah	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	738.984.000,00			738.984.000,00
	Jumlah	738.984.000,00			738.984.000,00

3.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 masing masing sebesar Rp.6.430.335.884,00 dan mengalami peningkatan nilai sebesar Rp.54.903.000,00 dari tahun 2018 sebesar Rp 6.375.432.884,00

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Alat Alat Besar Darat Mesin Proses	-	-	-	-
2	Alat -alat Bantu Electric Generating Set	12.425.000,00	-	-	12.425.000,00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	495.870.000,00	-	0,00	495.870.000,00
4	Kendraan Bermotor Angkutan Barang	383.000.000,00	-	-	383.000.000,00
5	Kendaraan Bermotor Beroda dua	1.092.142.331,00	126.832.000,00	-	1.218.974.331,00
6	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	330.000.000,00	59.900.000,00	196.000.000,00	193.900.000,00
7	Perkakas Bengkel Service	800.000,00	-	-	800.000,00
8	Perkakas Bengkel Kayu	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
9	Perkakas Bengkel Kerja	13.842.800,00	-	-	13.842.800,00
10	Alat Ukur Universal	52.690.000,00	-	-	52.690.000,00
11	Alat Ukur Lainnya	13.000.000,00	-	-	13.000.000,00
12	Alat Timbangan/ Blora	23.690.000,00	-	-	23.690.000,00
13	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	18.250.000,00	-	-	18.250.000,00
14	Alat Prosesing	9.026.505,00	-	-	9.026.505,00
15	Mesin Tik	37.390.000,00	-	2.000.000,00	35.390.000,00
16	Mesin Hitung/ Jumlah	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
17	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	203.653.000,00	-	1.300.000,00	202.353.000,00
18	Alat Kantor Lainnya	152.245.000,00	-	300.000,00	151.945.000,00
19	Meubelair	339.031.000,00	82.115.500,00	-	421.146.500,00
20	Alat Pendingin	367.471.000,00	31.100.000,00	6.250.000,00	392.321.000,00
21	Alat Pembersih	3.985.000,00	-	-	3.985.000,00
22	Alat Dapur	168.925.500,00	-	-	168.925.500,00
23	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Useles)	13.520.000,00	8.350.000,00	-	21.870.000,00
24	Personal Komputer	989.006.560,00	53.911.800,00	78.850.500,00	964.067.860,00
25	Peralatan Komputer Main Frame	59.500.000,00	-	-	59.500.000,00
26	Peralatan Mini Komputer	120.340.500,00	-	38.003.800,00	82.336.700,00
27	Peralatan Personal Komputer	200.534.688,00	14.623.000,00	12.875.000,00	202.282.688,00
28	Peralatan Jaringan	7.945.000,00	-	-	7.945.000,00
29	Meja Kerja Pejabat	289.901.605,00	-	1.500.000,00	288.401.605,00
30	Meja Rapat Pejabat	45.018.000,00	-	-	45.018.000,00
31	Kursi Kerja Pejabat	386.061.395,00	-	1.850.000,00	384.211.395,00
32	Kursi Rapat Pejabat	149.628.000,00	-	-	149.628.000,00
33	Peralatan Studio Visual	278.705.000,00	-	-	278.705.000,00
34	Peralatan Studio Video dan Film	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00
35	Alat Komunilasi Radio SSB	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
36	Alat Komunilasi Radio UHF	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
37	Peralatan Antena SHF/ Parabola	3.435.000,00	-	-	3.435.000,00
38	Alat Perlindungan	44.900.000,00	-	-	44.900.000,00
39	Peralatan Pemetaan Ukur	-	17.000.000,00	-	17.000.000,00
	Jumlah	6.375.432.884,00	393.832.300,00	338.929.300,00	6.430.335.884,00

\* Pengurangan nilai aset dikarenakan alih status pengguna 1 unit Speedboat (Alat Apung Bermotor Penumpang) dari DPMD TA 2012 senilai Rp. 196.000.000,00 ke Kecamatan Permata Intan berdasarkan SK No. 028/332/BPAD T.A 2019

\* Pengurangan nilai pada Alat Kantor dan Rumah Tangga dikarenakan Pengadaan 73 (tujuh puluh tiga) Kursi Lipat SPK No. 027/222/DPMD/2019 senilai Rp. 34.930.500,00 masuk barang Ekstra Kompatibel.

\* Reklasifikasi Pengadaan 5 (lima) unit Meja Kerja SPK No. 027/641/DPMD/2019 Senilai Rp. 7.200.000,00,- dari meubelair ke Alat Laboratorium Lainnya

\* Pengurangan pada Aset Tetap Al;at Kantor dan Rumah Tangga Senilai Rp. 95.837.000,00 dan Aset Kondisi Rusak Berat Senilai Rp. 51.550.000,00 yang dikarenakan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan SK No. 28/11/BPKAD

Kendaraan Bermotor Beroda dua		Penambahan	Pengurangan
*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
	Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Thn 2019 Sesuai SP No. 027/24/DPMD/2019 Tgl. 08 Maret 2019 dan BAP No. 027/27/DPMD/2019 Tanggal 1 April 2019.	126.832.000,00	0,00



Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang		Penambahan	Pengurangan
*	Jurnal Penyesuaian Reklas Peralatan dan Mesin Kendaraan Berpenumpang Alih Status Pengguna 1 (satu) unit Speedboat dari Dinas PMD ke Kecamatan Permata Intan .	196.000.000,00	-
*	Jurnal Pengalihan Status Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang berupa 1 (satu) Unit Speedboat sesuai SK Nomor 028/332/BPKAD/2019		196.000.000,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Klotok dan Perlengkapannya Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Thn 2019 Sesuai SPK No. 027/12/DPMD/2019 Tanggal 23 Januari & BAP No. 027/14/DPMD/2019 Tanggal 15 Pebruari 2019	59.900.000,00	0,00
Meubelair			
*	Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Pengadaan 5 (lima) Unit Meja Kerja dari Meubelier ke Alat Laboratorium Lainnya sesuai SPK No. 027/641/DPMD/2019.	7.200.000,00	0,00
*	Jurnal Penyesuaian Pengalihan Aset Tetap dari Meubelier ke Alat Laboratorium Lainnya sesuai SPK No. 027/641/DPMD/2019.	0,00	7.200.000,00
*	Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kegiatan Pengadaan Kursi Lipat Chitose Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPK No.027/222/DPMD/2019 Tgl 22 Apr 2019 & BAP No.027/220/DPMD/2019 Tgl 17 Mei 2019	34.930.500,00	0,00
*	Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kegiatan Pengadaan Kursi Putar Direktur Sesuai SPK No.027/222/DPMD/2019 Tgl 22 Apr 2019 & BAP No.027/220/DPMD/2019 Tgl 17 Mei 2019	4.950.000,00	0,00
*	Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kegiatan Pengadaan Kursi Sofa Sesuai SPK No.027/222/DPMD/2019 Tgl 22 Apr 2019 & BAP No.027/220/DPMD/2019 Tgl 17 Mei 2019	9.980.000,00	0,00
*	Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kegiatan Pengadaan Tenda Ukuran 4 x 6 m Sesuai SPK No.027/222/DPMD/2019 Tgl 22 Apr 2019 & BAP No.027/220/DPMD/2019 Tgl 17 Mei 2019	14.975.000,00	0,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Meja Bidang Kelembagaan Perkembangan Desa & Pelayanan Sosial Dasar, Air Conditioner (AC) & Blower Ruangan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tahun 2019 Sesuai SPB No. 027/641/DPMD/2019 Tanggal 02 September 2019.	17.280.000,00	0,00
Alat Pendingin			
*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tahun 2019, Sesuai SPB No. 027/572/DPMD/2019 Tanggal 25 Juni 2019 & BAP No. 027/576/DPMD/2019 Tgl 27 Juni 2019	8.000.000,00	0,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Meubelair Meja Bid. Kelembagaan Perkembangan Desa & Pelayanan Sosial Dasar, Air Conditioner (AC) dan Blower Ruangan Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tahun 2019 sesuai SPB No. 027/641/DPMD/2019 Tanggal 02 September 2019	23.100.000,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Rangka			
*	Jurnal Reklasifikasi Pengurangan Aset Tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga	95.837.000,00	0,00
*	Jurnal Penyesuaian Pengurangan Aset Tetap Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai SK Bupati Murung Raya Nomor : 028/11/BPKAD	0,00	95.837.000,00
Alat Rumah Rangka Lainnya			
*	Jurnal Penyesuaian Reklas Alat Kantor dan Rumah Tangga dalam kondisi Rusak Berat	51.550.000,00	0,00
*	Jurnal Penyesuaian Penghapusan Aset tetap dalam Kondisi Rusak Berat Sesuai SK Bupati Murung Raya Nomor : 028/11/BPKAD	0,00	51.550.000,00
*	Jurnal Penyesuaian Reklas Alat Kantor dan Rumah Tangga (73 Kursi Lipat) SPK No. 027/222/DPMD/2019 ke Barang Ekstra Kompatibel	34.930.000,00	0,00
*	Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Aset tetap (73 Kursi Lipat) dalam Kondisi Rusak Berat menjadi Barang Ekstra Kompatibel	0,00	34.930.000,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Televisi (TV) Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPB NO. 027/557/DPMD/2019 Tanggal 25 Juni 2019 dan BAP No. 027/581/DPMD/2019 Tanggal 27 Juni 2019.	8.350.000,00	0,00
Personal Komputer			
*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Laptop Operasional Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SP No.027/17/DPMD/2019 Tgl 25 Peb 2019 & BAP No.027/93/DPMD/2019 Tgl 21 Mar 2019.	14.668.800,00	0,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan PC All In One Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SP No.027/20/DPMD/2019 Tgl 1 Mar 2019 & BAP No.027/106/DPMD/2019 Tgl 4 Apr 2019.	19.767.200,00	0,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan PC All In One P3MD Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SP No.027/26/DPMD/2019 Tgl 8 Mar 2019 & BAP No.027/103/DPMD/2019 Tgl 8 Apr 2019.	19.475.800,00	0,00
Peralatan Personal Komputer			



*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Printer Multifungsi Sekretariat Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SP No.027/18/DPMD/2019 Tgl 25 Feb 2019 & BAP No.027/90/DPMD/2019 Tgl 21 Mar 2019.	14.623.000,00	0,00
Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur			
*	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Global Positioning System (GPS) Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SP No.027/16/DPMD/2019 Tgl 18 Feb 2019 & BAP No.027/677/DPMD/2019 Tgl 21 Mar 2019.	17.000.000,00	0,00

3.3.1.2.3 Gedung Dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.7.645.057.904,00 dan mengalami kenaikan senilai Rp 700.272.500,00 atau sebesar (9,16%) dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp.6.944.785.404,00.

No	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Bangunan Gedung Kantor	5.582.155.000,00	700.272.500,00	-	6.282.427.500,00
2	Bangunan Gedung Kantor Garasi/Pool	213.728.000,00	-	-	213.728.000,00
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.148.902.404,00	-	-	1.148.902.404,00
	Jumlah	6.944.785.404,00	700.272.500,00	-	7.645.057.904,00

Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan

*	Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Sekretariat APDESI/FKPMD/CSR (Lanjutan) Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPK No.027/46.b/DPMD/2019 Tgl 1 Apr 2019 & BAP No.027/592/DPMD/2019 Tgl 12 Agt 2019.	8.910.000,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Lanjutan Aula DPMD Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPK No.027/45.b/DPMD/2019 Tgl 1 Apr 2019 & BAP No.027/588/DPMD/2019 Tgl 12 Agt 2019.	32.780.000,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Tambahan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPK No.027/47.b/DPMD/2019 Tgl 1 Apr 2019 & BAP No.027/596/DPMD/2019 Tgl 12 Agt 2019	4.400.000,00
*	Pembayaran Termyn 95 & 5% Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Sekretariat APDESI/FKPMD/CSR (Lanjutan) Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPK No.027/77.b/DPMD/2019 Tgl 1 Jul 2019, BAP 95% No.027/568/DPMD/2019 Tgl 2 Agt 2019 & BAP 5% No.027/570	130.800.000,00
*	Pembayaran Termyn 95 & 5% Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Ruang Tambahan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPK No.027/74.b/DPMD/2019 Tgl 1 Jul 2019, BAP 95% No.027/561/DPMD/2019 Tgl 2 Agt 2019 & BAP 5% No.027/570	59.700.000,00
*	Pembayaran Honorarium Panitia Lelang/Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang & Jasa Kontruksi Lingkup Pemerintah Kab. Murung Raya Untuk 1 (Satu) Paket Lelang Pembangunan Lanjutan Aula DPMD Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019 Sesuai SK Bupati Murung Raya No.	4.250.000,00
*	Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Kegiatan/Pengawas/Pengelola Teknis Untuk 3 (Tiga) Paket Pembangunan Kontruksi Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pada DPMD Kab. Murung Raya TA.2019 Sesuai SK Nomor:800/255/2019 Tgl 29 Mar 2019.	12.000.000,00
*	Pembayaran Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Untuk 1 (Satu) Paket Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Aula DPMD Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019 Sesuai SK Kepala DMPD Kab. Murung Raya No.800/404/UMPEG/2019 Tgl 1 Okt 2019.	1.560.000,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Ruang Tambahan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPK No.027/49.b/DPMD/2019 Tgl 1 Jul 2019 & BAP No.027/874/DPMD/2019 Tgl 24 Sep 2019	3.190.000,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Sekretariat APDESI/FKPMD/CSR (Lanjutan) Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPK No.027/48.b/DPMD/2019 Tgl 1 Jul 2019 & BAP No.027/870/DPMD/2019 Tgl 24 Sep 2019.	5.940.000,00
*	Pembayaran Termyn 95 & 5% Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Aula DPMD Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPK No.027/69.b/DPMD/2019 Tgl 22 Agt 2019, BAP 95% No.027/1175/DPMD/2019 Tgl 11 Des 2019 & BAP 5% No.027/1177/DPMD/2019 Tgl 16	418.895.000,00
*	Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Lanjutan Aula DPMD Keg. Pembangunan Gedung Kantor Thn 2019, Sesuai SPK No.027/69.b/DPMD/2019 Tgl 22 Agt 2019 & BAP No.027/1143/DPMD/2019 Tgl 17 Des 2019.	17.847.500,00

3.3.1.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.0,00. Terlihat seperti tabel berikut:

No	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
	Jumlah	-			-

3.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya untuk TA. per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 175.470.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp.175.470.000,00



No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Buku Umum	175.470.000,00	-	-	175.470.000,00
2	Tanaman Obat dan Kosmetik	-	-	-	-
	Jumlah	175.470.000,00	-	-	175.470.000,00

3.3.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2019 sebesar Rp. (5.928.304.230,00) sedangkan untuk Tahun 2018 adalah Rp. (5.473.984.401,00) dengan rincian sebagai berikut :

No	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat- Alat Besar Darat	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Alat- Alat Bantu	(34.471.311,00)	(36.514.883,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat- Angkutan Darat Bermotor	(1.121.790.545,00)	(1.319.263.736,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat- Angkutan Apung Bermotor	(168.200.000,00)	(55.833.333,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat- Bengkel Bermesin	(21.150.440,00)	(24.051.133,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat- Bengkel Tak Bermesin	(186.667,00)	(346.667,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat- Alat Ukur	(22.121.668,00)	(27.661.668,00)
8	Akumulasi Penyusutan Alat- Pengolahan	(68.933.333,00)	(68.933.333,00)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(685.731.166,00)	(695.782.833,00)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(956.676.190,00)	(1.029.254.990,00)
11	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.064.502.464,00)	(1.170.217.538,00)
12	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Rapat Kerja/ Pejabat	(397.243.027,00)	(401.505.027,00)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(87.796.838,00)	(109.360.838,00)
14	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(40.516.677,00)	(44.316.681,00)
15	Akumulasi Penyusutan Unit- Unit Laboratorium	(435.313,00)	(808.438,00)
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(804.228.762,00)	(944.453.132,00)
	Jumlah	(5.473.984.401,00)	(5.928.304.230,00)

3.3.1.2.7 Aset Lainnya

Aset lain- lain merupakan reklasifikasi aset tetap, peralatan peralatan dan mesin ke aset lainnya, karena sudah rusak berat, maka barang tersebut dihapus dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Murung Raya tentang penghapusan aset tetap Nomor : 028/11/BPKAD. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 85.450.000,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 137.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Aset Lainnya	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
3	Aset Tidak Berwujud	29.500.000,00	-	-	29.500.000,00
4	Aset Lain-lain	107.500.000,00	-	51.550.000,00	55.950.000,00
5	Aset yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	-
	Jumlah	137.000.000,00	-	51.550.000,00	85.450.000,00

3.2 Kewajiban

3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp.5.655.818,00 dan Tahun 2018 Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-
2	Utang Bunga	-	-	-	-
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-
5	Utang Beban	-	5.655.818,00	-	5.655.818,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-



	Jumlah	-	5.655.818,00	-	5.655.818,00
--	--------	---	--------------	---	--------------

Rincian Utang Beban 2019

\* Utang Beban Barang dan Jasa

Hutang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.5.655.818,00 dan tahun 2018 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Utang Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1	Utang Beban Jasa Air	-	109.500,00	-	109.500,00
2	Utang Jasa Listrik Kantor	-	5.546.318,00	-	5.546.318,00
	Jumlah	-	-	-	5.655.818,00

\* Utang Beban Hibah

Hutang Beban Hibah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00 sedangkan hutang beban hibah tahun 2018 adalah Rp 0,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Utang Beban Hibah	31 Desember 2018	MUTASI		31 Desember 2019
		Rp	Penambahan	Pengurangan	Rp
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
3		-	-	-	-
4		-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 9.151.022.573,00** dan Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2018 adalah **Rp. 8.900.836.230,00**





3.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 13.296.934.714,00 Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

3.4.1 Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp.5.293.261.304,00 sedangkan untuk Tahun 2018 Rp. 6.114.826.275,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Beban Pegawai - LO	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS - LO	1.466.368.900,00	1.405.371.780,00
2	Beban Tunjangan Keluarga - LO	131.521.652,00	123.212.118,00
3	Beban Tunjangan Jabatan - LO	191.370.000,00	192.990.000,00
4	Beban Tunjangan Beras - LO	77.996.340,00	77.489.400,00
5	Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus - LO	3.309.444,00	2.930.753,00
6	Beban Pembulatan Gaji - LO	22.118,00	20.377,00
7	Beban Tunjangan Umum - LO	34.740.000,00	35.625.000,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.990.356,00	2.877.149,00
9	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.970.994,00	3.616.698,00
10	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	-	-
11	Beban Tunjangan Lauk Pauk - LO	218.118.000,00	214.437.000,00
12	Beban Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO	1.197.450.000,00	1.524.500.000,00
13	Beban Uang Lembur PNS - LO	49.894.000,00	49.486.000,00
14	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	371.319.500,00	926.350.000,00
15	Honor Tim Pengadaan Barang/ Jasa - LO	-	-
16	Honor Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber - LO	-	-
17	Honor PNS Lainnya - LO	-	-
18	Honor Pegawai Honorrer/ Pegawai Tidak Tetap - LO	1.539.190.000,00	1.555.920.000,00
	Jumlah	5.293.261.304,00	6.114.826.275,00

3.4.2 Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.4.415.244.213,00 dan untuk Tahun 2018 Rp.4.933.770.042,00 dengan penurunan Rp. 518.525.829,00 seperti pada rincian sebagai berikut :

No	Jenis Beban Barang dan Jasa - LO	2019 ( Rp )	2018 ( Rp )
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	169.639.500,00	197.713.750,00
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar Batere Kering)	6.975.500,00	9.800.000,00
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	19.441.000,00	29.196.000,00
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.991.000,00	14.997.950,00
No	Jenis Beban Barang dan Jasa - LO	2019 ( Rp )	2018 ( Rp )
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	94.944.000,00	99.936.000,00
6	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	49.866.000,00	89.530.000,00
7	Beban Persediaan Bahan/ Bibit Tanaman	0,00	4.000.000,00
8	Beban Persediaan Bahan Kimia dan Pupuk	2.000.000,00	2.500.000,00



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MURUNG RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

c	9	Beban Pendukung Pertanian/ Perikanan/Peternakan/Perkebunan	0,00	0,00
	10	Beban Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00
	11	Beban Persediaan Bahan Percontohan Pameran	1.500.000,00	1.500.000,00
	12	Beban Umbul- Umbul	0,00	7.500.000,00
	13	Beban Persediaan Bahan Praktek/ Pelatihan/ Sosialisasi	0,00	0,00
	14	Beban Tanah Subur	0,00	2.000.000,00
	15	Beban Jasa Telpon	2.301.300,00	3.001.880,00
	16	Beban Jasa air	1.271.500,00	1.178.000,00
	17	Beban Jasa Listrik	90.659.002,00	68.620.187,00
	18	Beban Jasa Surat Kabar/ Majalah	29.995.000,00	26.550.000,00
	19	Beban Jasa Kawat/ Faximili/Internet	13.722.633,00	12.845.460,00
	20	Beban Dekorasi	0,00	10.000.000,00
	21	Beban Dokumentasi	0,00	0,00
	22	Beban Jasa Pendukung Kegiatan	59.800.000,00	40.800.000,00
	23	Beban Jasa Service	4.500.000,00	24.949.966,00
	24	Beban Penggantian Suku Cadang	79.957.000,00	43.998.500,00
	25	Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	7.971.000,00	9.615.000,00
	26	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	7.681.628,00	5.350.127,00
	27	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00
	28	Beban Cetak	42.036.700,00	57.596.400,00
	29	Beban Penggandaan	120.130.850,00	127.579.200,00
	30	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.450.000,00	19.850.000,00
	31	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	3.200.000,00
	32	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	7.000.000,00
	33	Beban Sewa Meja Kursi	0,00	5.000.000,00
	34	Beban Sewa Generator	0,00	0,00
	35	Beban Sewa Tenda	0,00	7.500.000,00
	36	Beban Sewa Sound System	1.500.000,00	17.500.000,00
	37	Beban Makan dan Minuman Rapat	15.988.000,00	65.100.000,00
	38	Beban Makan Minuman Tamu	20.272.000,00	10.000.000,00
	39	Beban Makan Minuman Kegiatan	176.930.000,00	304.925.300,00
	40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00
	41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	89.418.300,00
	42	Beban Pakaian Kerja Lapangan	97.200.000,00	4.998.000,00
	43	Beban Pakaian Korpri	0,00	0,00
	44	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	13.000.000,00
	45	Beban Pakaian Batik Tradisional	17.000.000,00	67.370.000,00
	46	Beban Pakaian Olah Raga	52.360.000,00	0,00
	47	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.843.400.400,00	2.016.548.000,00
	48	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.153.421.200,00	1.194.980.306,00
	49	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	20.000.000,00
	50	Beban Pemeliharaan Gedung Bangunan	19.976.000,00	54.147.500,00
	No	Jenis Beban Barang dan Jasa - LO	2019 ( Rp )	2018 ( Rp )
	51	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	0,00
	52	Beban Bimbingan Teknis	-	14.500.000,00
	53	Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur	22.900.000,00	23.400.000,00
	54	Beban Moderator	0,00	0,00
	55	Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur - LO	72.900.000,00	9.000.000,00
	56	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -LO	0,00	0,00
	57	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,00	4.800.000,00
	58	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,00	0,00
	59	Beban Honorarium Pegawai Honorrer/ tidak tetap - LO	0,00	0,00
	60	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MURUNG RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

61	Beban Barang untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga Selain Hibah/ Bansos	0,00	26.572.000,00
62	Beban Sewa Sound System	0,00	0,00
63	Beban Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/ Bimtek/Olahraga	64.063.000,00	64.202.216,00
64	Beban Hibah Perlombaan/ Penghargaan - Barang	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.415.244.213,00</b>	<b>4.933.770.042,00</b>

3.4.3 **Beban Hibah**

Beban Hibah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada posisi 31 Desember 2019, untuk Saldo Beban Hibah adalah sebesar Rp.3.590.056.000,00 dan untuk 2018 adalah Rp.8.170.444.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Hibah	2019 ( Rp )	2018 ( Rp )
1	Beban Hibah Kepada Masyarakat	3.590.056.000,00	8.170.444.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.590.056.000,00</b>	<b>8.170.444.000,00</b>

3.4.4 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada posisi 31 Desember 2019, adalah Rp.580.086.496,00 dan untuk tahun 2018 saldo Rp. 683.892.773,00 yang terlihat seperti pada rincian rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2019 ( Rp )	2018 ( Rp )
1	Beban Penyusutan Alat- alat Besar Darat		
2	Beban Penyusutan Alat Alat Bantu	2.043.572,00	2.043.572,00
3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	197.473.191,00	191.725.628,00
4	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Berotor	13.400.000,00	33.000.000,00
5	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	2.900.693,00	3.884.280,00
6	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	160.000,00	160.000,00
7	Beban Penyusutan Alat Ukur	5.540.000,00	3.040.000,00
8	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	-	-
9	Beban Penyusutan Alat Kantor	10.051.667,00	69.851.485,00
10	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	72.578.800,00	87.935.178,00
11	Beban Penyusutan Komputer	105.715.074,00	123.807.493,00
12	Beban Penyusutan Meja/Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	4.262.000,00	23.937.171,00
13	Beban Penyusutan Alat - alat Studio	21.564.000,00	15.963.500,00
14	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	3.800.004,00	3.800.004,00
15	Beban Penyusutan Unit - unit Laboratorium	373.125,00	373.125,00
16	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.224.370,00	124.371.337,00
	<b>Jumlah</b>	<b>580.086.496,00</b>	<b>683.892.773,00</b>

3.4.5 **Beban Lain-lain**

Beban Lain – lain adalah pada posisi 31 Desember 2019, untuk Saldo Beban Lain – lain Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 47.092.300,00 dan untuk 2018 saldo adalah Rp.899.999,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Lain-lain	2019 ( Rp )	2018 ( Rp )
1	Beban Lain-lain	47.092.300,00	899.999,00
	<b>Jumlah</b>	<b>47.092.300,00</b>	<b>899.999,00</b>

3.4.6 **Kegiatan Non Operasional**

Kegiatan Non Operasional pada posisi tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 147.387.000,00 dengan rincian sbb :

No	Beban Lain-lain	2019 ( Rp )	2018 ( Rp )
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	147.387.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>147.387.000,00</b>	<b>-</b>



3.4.7 Surplus Defisit LO

Surplus Defisit LO pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 adalah sebesar **Rp.(14.073.127.313,00)** dan Tahun 2018 sebesar **Rp.(19.903.833.089,00)** *Defisit mengalami penurunan* dari Tahun 2018 yaitu sebesar **Rp. 5.830.705.776,00** atau 29,29 %.



### 3.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 terdapat saldo awal ekuitas untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar Rp.8.900.836.230,00.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar (Rp.14.073.127.303,00,-) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Koreksi Ekuitas Lainnya adalah Rp. 70.233.333,00
4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah Rp. 14.387.891.171,00
5. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **9.145.366.755,00**